

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah Negara Agraris, Negara yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Kawasan pertanian adalah kawasan yang begitu diperlukan, maka dari itu kawasan pertanian menjadi faktor utama pembangunan yang mencakup keperluan industri nasional, keperluan pangan, mengembangkan ekspor, memperoleh lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan petani.¹

Program pengadaan pupuk bersubsidi telah diadakan mulai Tahun 1970-an, tujuan program ini agar mempermudah petani saat mereka membutuhkan pupuk untuk tanamannya, tersedia dengan tarif yang murah, tetapi pengadaan pupuk subsidi ini sempat diberhentikan pada tahun 1998 setelah itu pada tahun 2003 diadakan kembali program dari pemerintah berbentuk pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Adanya program pengadaan pupuk bersubsidi ini diinginkan hasil panen petani bisa bertambah sehingga penghasilan petani juga bisa meningkat. Semenjak diberhentikan pupuk bersubsidi petani kesulitan memperoleh pupuk. Sehingga

¹ Meliana Ayu Safitri, DKK, Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Malang: *Jurnal Administrasi Public (JAP)* Vol. 1 No.1), 102. <https://www.neliti.com/id/publications/72672/distribusi-pupuk-subsidi-kepada-petani-tebu-dalam-perspektif-manajemen-publik-st> (Diakses pada tanggal 7 maret 2023).

produksi petani mengalami penurunan karena harga pupuk non subsidi yang begitu mahal.²

Distribusi menjadi salah satu bidang terpenting dalam kegiatan perekonomian karena didalam bidang distribusi selain berkaitan dengan sudut pandang ekonomi, juga berkaitan dengan sudut pandang sosial dan politik, oleh sebab itu pendistribusian menjadi ketertarikan para ekonom Islam maupun konvensional hingga saat ini.

Dalam teorinya Yusuf Qardhawi mengatakan “Sistem Ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang mendefinisikan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan bukti prinsip kebebasan yaitu hak milik dan warisan, Seorang yang memiliki suatu benda dapat menguasai dan memanfaatkannya. Ia dapat pula mengembangkan hak miliknya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh islam. Islam mengajarkan perlindungan terhadap hak milik pribadi dari perbuatan zalim dan menganjurkan mempertahankan hak miliknya. Kebebasan mengharuskan

² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129267/permendag-no-15m-dagper42013-tahun-2013>.
(Diakses pada tanggal 7 maret 2023).

seorang untuk menanggung resiko sesuai dengan apa yang dilakukan dan memberikan hak orang lain yang terdapat didalam hartanya sedangkan Keadilan disini tidak berarti sama rata akan tetapi menyamakan dua hal yang sama sesuai batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterpaduan kondisi antar keduanya.³

Muhammad Baqir Ash-shadr berpendapat bahwasanya distribusi merupakan suatu cara dimana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan Negara. Dan prinsip-prinsip yang harus ada di dalam suatu pendistribusian yaitu kebebasan, pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan publik, keadilan serta pelarangan monopoli.⁴

Didalam undang-undang pertanian nomor 47 tahun 2018 mengenai jatah dan HET pupuk bersubsidi yang menetapkan bahwa pupuk bersubsidi diberikan kepada anggota kelompok tani yang sudah mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Tabel 1.1

Rekap kelompok tani penerima pupuk bersubsidi kecamatan pace

NO	Desa	Jumlah POKTAN
1	Babadan	4
2	Banaran	4
3	Batembat	4

³ Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 201.

⁴ Muhammad Baqir ash Shadr, *Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008), 145.

4	Bodor	4
5	Cerme	4
6	Gemenggeng	5
7	Gondang	5
8	Jampes	3
9	Jatigreges	8
10	Jetis	4
11	Joho	7
12	Kecubung	3
13	Kepanjen	7
14	Mlandangan	5
15	Pace wetan	7
16	Pacekulon	4
17	Plosoharjo	5
18	Sanan	3
Jumlah		86

Sumber: pusat penyuluhan pertanian kecamatan pace⁵

Pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi sudah dilaksanakan di semua wilayah Indonesia, begitu juga di wilayah kecamatan pace kabupaten Nganjuk. Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa desa jatigreges termasuk salah satu penerima pengalokasian pupuk bersubsidi terbanyak pada tingkatan kecamatan pace hal itu dapat kita ketahui dari jumlah kelompok tani yang bergabung pada gapoktan pusat kecamatan.

Tabel 1.2

Harga jual pupuk subsidi dan non-subsidi pada tingkatan pengecer Desa Jatigreges

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/kg)	(Rp/zak)
UREA	1.800	90.000 (@ 50 Kg)

⁵ Observasi dikantor pertanian kecamatan pace tanggal 23 Mei 2022.

SP-36	2.000	100.000	(@ 50 Kg)
ZA	1.400	70.000	(@ 50 Kg)
NPK	2.300	115.000	(@ 50 Kg)
ORGANIK	500	20.000	(@ 40 Kg)
NPK FORMULA KHUSUS	3.000	150.000	(@ 50 Kg)

Sumber: gabungan kelompok Tani Juro Makmur

Peneliti memilih lokasi Desa Jatigreges dikarenakan wilayah tersebut termasuk wilayah dengan jumlah kelompok tani terbanyak yang bergabung dalam gapoktan kecamatan pace dengan luas tanah pertanian kurang lebih 300 hektar. Pada dasarnya, sistem pembelian pupuk bersubsidi yang dilakukan petani juro makmur menggunakan sistem pembelian jatuh tempo yang mana petani diberi jangka waktu dalam pembelian pupuk bersubsidi, di balik diberlakukannya sistem tersebut ada sebagian petani yang keberatan dengan sistem pembelian jatuh tempo dikarenakan pada senggang waktu tersebut belum mempunyai uang untuk menebusnya dan jika petani tidak bisa menebusnya dan jika petani tidak bisa menebusnya pada waktu tersebut, maka jatah pupuk akan hangus dan petani tidak mendapatkan jatahnya pada musim tanam tersebut kecuali mereka membelinya dengan harga nonsubsidi. Sementara itu tujuan diadakannya sistem tersebut agar petani tertib dalam pembelian pupuk dikarenakan minimnya tempat penampungan pada kios pengecer dan mengingat sekarang pasokan pupuk bersubsidi sangat langka sehingga pengedarannya juga dibatasi. Dalam peraturan menteri perdagangan

Nomor 15/ M-DAG/per/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pasal 20 ayat (4) bahwa “pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET”.⁶ Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Juro Makmur Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)”**.

⁶ Republik Indonesia, *peraturan menteri perdagangan*, pasal 20, ayat 4.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pendistribusian Pupuk Bersubsidi pada Kelompok Tani Juro Makmur Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Juro Makmur Perspektif Yusuf Qardhawi di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Sistem Pendistribusian Pupuk Bersubsidi pada Kelompok Tani Juro Makmur Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Juro Makmur Perspektif Yusuf Qardhawi di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa bagaimana sistem penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga manfaat yang diharapkan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah. Terutama yang masih memerlukan penelitian yang detail di bidang ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis ingin mendapatkan kefahaman yang luas dan mendalam mengenai latar belakang penyaluran pupuk bersubsidi, dan mengetahui pendistribusian pupuk dalam pandangan Yusuf Qardhawi.

b. Bagi Lembaga Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi permasalahan ekonomi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitiannya yang berkaitan dengan pendistribusian pupuk.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Siti Ngatini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pupuk Bersubsidi (Studi kasus desa branggahan, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten kediri)” Tahun 2019.

Dalam skripsi ini memfokuskan mengenai praktek jual beli pupuk bersubsidi yang dilaksanakan di Desa Branggahan, kecamatan ngadiluwih, kabupaten Kediri. Dengan permasalahan pendistribusian pupuk menggunakan sistem paketan dimana peraturan ini mewajibkan petani membeli pupuk jenis Lain, sementara itu petani sekedar memerlukan salah satu pupuk saja. Sedangkan membeli pupuk bersubsidi harus ditempat rayon yang sudah ditentukan. Apabila petani tidak membeli pupuk bersubsidi dengan aturan tersebut, petani tidak akan mendapatkan pupuk dari kios. Sementara itu membeli dilokasi lain juga tidak dilayani karena bukan wilayahnya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang kemudian dianalisis menggunakan pandangan hukum Islam tentang jual beli. Dan hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa transaksi tersebut sah-sah saja/ boleh dilakukan karena menurut hukum Islam termasuk jual beli bersyarat yang didalamnya mengandung manfaat.⁷

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pupuk bersubsidi. Perbedaannya adalah peneliti ini berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang praktik jual belinya sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai bagaimana sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dan akan dianalisis menggunakan teori yusuf qardhawi.

⁷ Ngatini siti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pupuk Bersubsidi (Studi kasus desa branggahan, kecamatan ngadiluwih, kabupaten Kediri)*”. IAIN Kediri, 2019.

2. Skripsi Muhammad Aziz dengan judul “Analisis Dampak Distribusi Pupuk Bersubsidi terhadap Produksi Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus).

Dalam skripsi ini memfokuskan mengenai bagaimana pendistribusian dan praktek pendistribusian pupuk bersubsidi berlandaskan Islam yang terjadi di Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya penyimpangan ketimpangan harga pupuk bersubsidi yang menyimpang dengan aturan HET dari pemerintah dan juga tidak cocoknya total pupuk yang diajukan oleh kelompok tani dengan bantuan oleh pemerintah sehingga petani kesusahan mendapatkan tambahan pupuk lainnya yang kemudian dapat memberikan kesempatan para distributor pupuk untuk melakukan penyelewengan seperti menjual pupuk diluar wilayah mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang kemudian dianalisis menggunakan pandangan Islam tentang jual beli pupuk bersubsidi dan juga konsep dasar kementerian pendistribusian pupuk bersubsidi pada kementerian pertanian. Dengan hasil penelitian yaitu bahwa dalam pandangan ekonomi Islam, sistem distribusi pupuk bersubsidi di pekan kuta Dalam kecamatan Tanggamus belum sesuai dengan pilar-pilar distribusi dalam ekonomi Islam karena penjualan pupuk

bersubsidi belum sesuai dengan ketetapan dan peraturan pemerintah mengenai HET.⁸

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendistribusian pupuk bersubsidi, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada dampak distribusi pupuk terhadap produksi padi dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dan akan dianalisis menggunakan teori Yusuf Qardhawi.

3. Jurnal penelitian oleh Apri Sunarsi dengan judul “Analisis Teori Keadilan Menurut Yusuf Qhardawi Terhadap Distribusi Konversi Minyak Tanah ke LPG Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus di Dusun Limau Manis Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur). Tahun 2020.⁹

Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana teori keadilan menurut Yusuf Qhardawi yang dilatarbelakangi dengan permasalahan pendistribusian LPG yang belum tepat sasaran, hal ini mengakibatkan masyarakat kecewa dengan pendistribusian gas tersebut.

⁸ Muhammad Aziz, “Analisis Dampak Distribusi Pupuk Bersubsidi terhadap Produksi Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

⁹ Apri Sunarsi, Analisis Teori Keadilan Menurut Yusuf Qhardawi Terhadap Distribusi Konvensi Minyak Tanah ke LPG Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Bandung: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No 1, 2020), 11.
https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/19209 (diakses pada tanggal 7 maret).

Lantaran secara keuangan mereka termasuk kriteria yang tidak berwenang memperoleh donasi gas LPG 3 kg.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan dianalisis menggunakan teori keadilan menurut Yusuf Qhardawi sebagai pemecahan masalah tentang pendistribusian yang sudah berjalan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa dalam kegiatan pendistribusian gas LPG kepada masyarakat tidak diawasi langsung oleh petugas sehingga menyebabkan ketimpangan dan tidak tepat sasaran. Dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan Yusuf Qardhawi.

Persamaan penelitian Apri Sunarsi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai teori dari Yusuf Qhardawi sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada obyek penelitian. Penelitian tersebut menggunakan obyek gas LPG bersubsidi sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan obyek pupuk bersubsidi.

4. Jurnal penelitian oleh Sularno dengan judul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat.”¹⁰

¹⁰ Sularno, Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Dosen fakultas pertanian UMJ (Jakarta: *Jurnal Agrobisnis dan Teknologi*, vol. 1. NO. 2, Desember 2016), 76. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/ftan/article/view/1486> (Diakses pada tanggal 7 maret).

Dalam jurnal ini memfokuskan mengenai bagaimana alur penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi yang lancar serta tepat guna sebagai referensi kepada pemerintah daerah kabupaten karawang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa perseteruan yang ditemukan pada penelitian sebelumnya salah satunya mengenai cara penyaluran pupuk yang rumit, yang menyebabkan telatnya pupuk pada musim tanam dan mengganggu proses produksi. Dan hasil dari penelitian ini masih ada penyelewengan dalam pengadaan pupuk bersubsidi misalnya penjualan pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak akuratnya pendataan RDKK, menghitung kapasitas pengedaran, dan kurangnya supervisi pupuk bersubsidi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang kebijakan pemerintah tentang penyaluran pupuk sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana pendistribusian pupuk bersubsidi perspektif yusuf qardhawi.

5. Skripsi oleh Rizki Inayatul Khasanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (studi kasus di desa

bantarkawung kecamatan bantarkawung kabupaten brebes)”. Tahun 2018.¹¹

Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Dengan permasalahan mengenai kurangnya pasokan pupuk, yang tidak sesuai antara pengajuan RDKK oleh petani dengan jumlah pupuk yang masuk di toko pengecer. Sehingga pengecer membeli pupuk ke kios lainnya yang mengakibatkan harga pupuk tidak sesuai dengan HET dari pemerintah. Adapun pupuk yang mengalami kenaikan yaitu pupuk jenis SP36 dan NPK.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang kemudian dianalisis dengan pandangan hukum Islam untuk pemecahan masalah pendistribusian yang telah berjalan dapat memastikan keefektifan dan keefisienan pendistribusian pupuk dikalangan petani. Hasil dari penelitian tersebut bahwa menurut perspektif hukum Islam, sistem distribusi pupuk bersubsidi di desa bantarkawung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, khususnya pada prinsip kebebasan dan keadilan. Islam memberi kebebasan memberi kebebasan kepada para pedagang dan tidak menerapkan penyeragaman sistem distribusi.

¹¹ Rizki Inayatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi, (studi kasus di desa bantarkawung kecamatan bantarkawung kabupaten brebes)*. Iain Purwokerto, 2018.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Inayatul Khasanah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian pupuk bersubsidi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini dianalisis menggunakan pandangan hukum Islam sementara penelitian yang akan dilaksanakan penulis dianalisis dengan teori yusuf qardhawi.